

BAB V

KESIMPULAN , IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Dalam Bab terakhir ini, disajikan kesimpulan yang merupakan intisari dari keseluruhan pelaksanaan penelitian yang sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Untuk mensikapi munculnya berbagai permasalahan yang muncul selama penelitian ini berlangsung, maka dalam bab ini dirumuskan beberapa saran yang diharapkan merupakan solusi pemecahan atas permasalahan yang dihadapi di lapangan.

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Dewan sekolah merupakan alternatif pengelolaan sekolah dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya pendidikan yang bermutu. Konsep Dewan sekolah merupakan konsep yang diadopsi dari pendidikan di luar negeri yang disebut School Board (Amerika) di Australia disebut School Council. Dalam batas operasional Dewan Sekolah ini dapat diartikan sebagai model atau sosok wadah yang bertujuan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pemerintah, meningkatkan tanggungjawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel

dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Konsep Dewan Sekolah dalam prakteknya akan menggambarkan sifat-sifat otonomi penyelenggaraan pendidikan serta pencapaian tujuan pendidikan melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi, demokratisasi pendidikan dan peranserta masyarakat yang lebih optimal. Dewan Sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Manajemen Berbasis Sekolah.

Dewan Sekolah dapat terdiri dari satu sekolah, atau beberapa sekolah pada jenjang yang sama, atau beberapa sekolah yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau sekolah-sekolah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan atau karena pertimbangan lainnya. Dewan sekolah bersifat mandiri tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

2. Kesimpulan Khusus

Merujuk pada deskripsi data yang disajikan dalam bab IV, berikut ini disajikan kesimpulan khusus :

- a. Analisis Kondisi Kemampuan Stakeholders dalam Implementasi Dewan Sekolah di SD Negeri ditinjau dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

1) Kekuatan

Beberapa kondisi yang dapat memberikan kekuatan terhadap pergantian BP 3 menjadi Dewan Sekolah di kabupaten Majalengka, dapat

diidentifikasi ke dalam lima kondisi. *Pertama*, dirumuskannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerindah Daerah, Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 29 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka dan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 06 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. Dengan demikian, maka secara yuridis formal perubahan paradigma dalam dunia pendidikan mendapat dukungan yuridis formal yang merupakan suatu kekuatan untuk melaksanakan program MBS. Dengan dukungan politik dari pemerintah serta keinginan masyarakat yang mencintai pendidikan, maka program School Based Manajemen (SBM) dengan Dewan Sekolah di Kabupaten Majalengka mendapat sambutan positif dari insan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh politik, birokrat serta orang tua. *Kedua*, sosialisasi Dewan Sekolah, yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dilanjutkan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka kepada para Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta guru dan para pengurus Dewan Sekolah (ketua dan Bendahara) dari masing-masing satuan Pendidikan, *Ketiga*, adanya dukungan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang implikasinya adalah para Kepala Sekolah terdorong

untuk senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelayanan Proses Belajar Mengajar (PBM). *Keempat*, Adanya bantuan dari Bank Dunia untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (BEP) yang pada intinya merupakan dukungan yang berarti terhadap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.

2) Kelemahan

Belum meratanya kemampuan manajerial dari Dewan Sekolah dalam pengelolaan sekolah merupakan salah satu kelemahan yang ada dari Implementasi Dewan Sekolah. *Kedua*, belum meratanya daya dukung dan partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang disebabkan beberapa faktor misalnya status sosial ekonomi masyarakat, masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan, kurang informasi tentang pendidikan, masih terbiasa dengan pola pikir yang lama. Kondisi seperti ini akan menghambat terhadap keberadaan Dewan Sekolah.

3) Peluang

Pertama, Adanya keinginan baik (*political will*) dari pemerintah untuk mengimplementasikan MBS serta adanya kesungguhan dari Dinas Propinsi Jawa Barat dengan membentuk Tim Pokja MBS dengan terbitnya buku panduan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, hal ini memudahkan dan melancarkan terhadap keinginan adanya perubahan tentang pengelolaan pendidikan yang selama ini berjalan. Di kabupaten

Majalengka kesungguhan Bupati untuk mensukseskan program ini dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Majalengka tentang pembentukan Dewan Sekolah di sekolah Dalam Binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka. *Kedua*, adanya jalinan kerjasama dengan para pengusaha yang ada di lingkungan sekolah dengan skala berpariatif. Kondisi tersebut dapat dijadikan peluang oleh sekolah untuk menggali dana dengan merumuskan dan menawarkan program-program ke pihak pengusaha. *Ketiga*, adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang jelas mengenai kedudukan Dewan Sekolah yang sudah lengkap dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sehingga dalam pelaksanaan sudah tidak ada keraguan dan kekakuan, dengan demikian upaya-upaya ke arah peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam Manajemen Berbasis Sekolah dapat dicapai secara optimal.

4) Tantangan

Kondisi-kondisi yang merupakan tantangan dalam Implementasi Dewan sekolah pada sekolah Dasar di Kabupaten Majalengka dapat diidentifikasi menjadi tiga kondisi. *Pertama*, peralihan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan di sekolah yang dipimpinnya (desentralisasi) sehingga masing-masing sekolah dapat menonjolkan kemampuannya secara kompetitif dalam mengejar mutu pendidikan, hal ini merupakan tantangan dari para praktisi pendidikan untuk tidak terpaku pada juklak dan juknis yang selama ini terjadi.



Kedua, Pendidikan Dasar dikatakan sebagai kunci keberhasilan merupakan fondasi untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. *Ketiga*, masyarakat cenderung memilih pendidikan yang lebih baik, sehingga hal ini menantang institusi pendidikan untuk lebih meningkatkan daya tarik dengan cara meningkatkan pelayanan, meningkatkan kinerja dan dapat memberikan jaminan mutu (*quality assurance*) kepada masyarakat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

b. Strategi Pemberdayaan Dewan Sekolah di Sekolah Dasar Negeri dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

1) Pemahaman tentang Dewan Sekolah berada dalam kondisi sebagai berikut :

- (a) Semua Kepala sekolah, Guru, Pengurus Dewan Sekolah, Orang tua, Tokoh Masyarakat diberikan pemahaman tentang Dewan sekolah.melalui sosialisasi.
- (b) Semua sekolah diberikan pemahaman mengenai pentingnya sekolah memiliki visi dan misi sekolah.
- (c) Semua Pengurus Dewan Sekolah diberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsinya serta wewenang dan tanggung jawabnya.

2) Pembentukan Dewan sekolah di sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

- (a) Semua Sekolah sudah memiliki kepengurusan Dewan Sekolah. Keanggotaan terdiri dari unsur masyarakat, Tokoh masyarakat, orang tua/wali peserta didik, tokoh pendidikan, dunia usaha, wakil alumni, unsur Dewan Guru.
- (b) Jumlah anggota rata-rata 8 orang terdiri dari Ketua, wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan dibantu beberapa asisten bidang :
 - a. Penggalan Sumber Daya Sekolah,
 - b. Pengelolaan Dana Masyarakat,
 - c. Pengendali Kualitas Pelayanan pendidikan,
 - d. Jaringan Kerjasama dan Informasi.
- (c) Pengurus Dewan sekolah semuanya dipilih dan dibentuk secara musyawarah untuk mufakat dengan prinsip transparan, akuntabel dan merupakan mitra satuan pendidikan.
- (d) Masa jabatan keanggotaan Dewan Sekolah selama 3 tahun dan dapat diangkat untuk satu kali periode berikutnya.
- (e) Tidak ada Ketua Dewan Sekolah dari Kepala satuan Pendidikan.

Kegiatan Dewan Sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Majalengka dijelaskan dalam kondisi sebagai berikut :

- (a) Dengan dibentuknya Dewan Sekolah, maka eksistensi lembaga BP-3, Komite Sekolah, Majelis Sekolah dan Bursa Kerja Khusus menjadi bubar atau hilang dari peraturan persekolahan.
- (b) Berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di sekolah.

- (c) Memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam menentukan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah.
- (d) Mendukung terhadap kegiatan sekolah dalam bentuk finansial, pemikiran, maupun tenaga.
- (e) Dewan sekolah berfungsi sebagai alat kontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dengan kata lain Dewan Sekolah merupakan DPR yang mengawasi lembaga sekolah negeri itu.

c. Peranan Dewan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Dari hasil wawancara dengan ketua Dewan Sekolah dan telaah dokumentasi berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, dapat dideskripsikan bahwa peranan Dewan Sekolah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan sebagai berikut :

- 1) Mengintensipkan kegiatan serta melibatkan diri dalam kegiatan sekolah sesuai tugas dan wewenang yang disepakati.
- 2) Ikut merumuskan desain pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga dapat memberikan kontribusi ke arah peningkatan mutu pendidikan.
- 3) Ikut serta merumuskan dan melaksanakan berbagai program unggulan sekolah.

B. Implikasi

Dari kesimpulan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa implikasi sebagai berikut :

- 1). Keberhasilan implementasi Dewan Sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Secara internal faktor kekuatan dan kelemahan akan sangat mempengaruhi eksistensi Dewan Sekolah yang relatif masih baru dikenal dalam dunia pendidikan kita, dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka akan diketahui bagaimana mencari solusi yang terbaik. Dari hasil analisis, diperoleh beberapa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Dewan Sekolah pada pengelolaan Sekolah Dasar di Kabupaten Majalengka, yakni : (1) Masih rendahnya kemampuan Manajerial Ketua Dewan Sekolah, (2) rendahnya potensi pada sebagian besar anggota masyarakat (3) rendahnya daya dukung dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan (4) minimnya dana pendidikan untuk membiayai peningkatan mutu pendidikan.
- 2). Adanya perbedaan wilayah, hal ini berimplikasi bahwa implementasi Dewan Sekolah dilaksanakan dengan berbagai macam reaksi, baik reaksi positif maupun reaksi negatif, maka perlu dilakukan pengkajian dengan memfokuskan pada analisis kesiapan indikator-indikator pelaksanaan Dewan sekolah. Dengan demikian perlu diidentifikasi kemampuan daerah, maupun kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlalu banyak mengalami hambatan.

3). Kinerja Dewan Sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah memerlukan berbagai dimensi pendukung, faktor utama berhasil tidaknya program Dewan Sekolah ditentukan dari upaya Ketua Dewan Sekolah. Ketua Dewan Sekolah dituntut untuk piawai dalam menggalang dana, melakukan loby-loby dengan pihak luar, serta lincah bergerak, serta concern terhadap pendidikan, apabila Ketua Dewan Sekolah tidak berdaya dan berupaya untuk melakukan hal di atas, maka keberhasilan pelaksanaan MBS sulit untuk diwujudkan.

c. Rekomendasi

Berangkat dari kesimpulan dan implikasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis akan mengemukakan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi secara komprehensif kepada segenap lapisan masyarakat, sehingga yang tahu mengenai perubahan dalam bidang pendidikan ini tidak secara parsial dan diketahui hanya oleh yang berkepentingan saja, hal ini penting untuk dilaksanakan guna menyamakan persepsi kita terhadap Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Perlunya program pembinaan yang difokuskan terhadap kemampuan manajerial Dewan Sekolah serta khususnya dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah.

3. Perlunya upaya peningkatan kompetensi pengurus Dewan Sekolah dalam turut serta meningkatkan kualitas mengajar, dalam hal ini Dinas P dan K dan kepala Sekolah dapat merumuskan suatu cara bagaimana upaya meningkatkan kinerja Dewan Sekolah di lingkungan Sekolahnya.
4. Perlu adanya penyuluhan terhadap masyarakat yang daya dukungnya serta partisipasinya rendah terhadap penyelenggaraan pendidikan, hal ini dapat dilakukan oleh Dinas P dan K, Kepala Sekolah bersama – sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa dan kecamatan untuk membangkitkan minat terhadap pendidikan.



